

# MUHAMMADIYAH

## Dari Gerakan Pembaharuan ke Gerakan Amal Usaha

Oleh: Sudibyo Markus

### I. LATAR BELAKANG

#### 1. Muhammadiyah- Nasionalisme dan Kebangsaan.

Banyak program dan kegiatan Muhammadiyah, sejak awal pendiriannya di tahun 1912 hingga hari ini, yang secara empirik menunjukkan, bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan da'wah dan amar ma'ruf nahi munkar, yang memfokuskan kegiatannya di bidang da'wah, tarbiyah dan kesejahteraan sosial, selalu bersentuhan dan terkait erat dengan peri kehidupan ber masyarakat, berbangsa dan bernegara secara luas. Keterlibatan para *founding fathers* Muhammadiyah dalam Boedi Oetomo di tahun 1908, keterlibatan aktif Pimpinan Aisyiyah dalam Kongres Wanita Indonesia I di tahun 1928, keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menunjukkan, bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam juga merupakan motor gerakan kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia.

#### 2. Keragaman budaya dan lintas agama.

Walaupun ada pendapat bahwa didirikannya Muhammadiyah dan strategi gerakannya sebagai gerakan da'wah dan amar ma'ruf nahi munkar, adalah dalam rangka membendung arus kerstening politik (Kristenisasi) dari pemerintah kolonial Hindia Belanda di era Gubernur Jenderal AWF Idenburg (1906 – 1916) (Alwi Shihab, Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia, 1998, p. 149), namun kemudian sikap Muhammadiyah yang menghargai keragaman kepercayaan dan budaya tidak dapat dipungkiri.

Ketika Muhammadiyah mendirikan RS PKO pertama di Yogyakarta dan Surabaya pada tahun 1923, Muhammadiyah tak memiliki dokter Muslim seorangpun. Hingga yang bekerja adalah "sinyo-sinyo" dokter Belanda yang dengan antusias menyambut semangat kemanusiaan baru di era itu.

Berbagai dialog yang dirintis oleh KHA Dahlan dengan sejumlah missionaris, sama sekali tak bermaksud mengubah keyakinan mitra dialognya, melainkan adalah dalam rangka membuka iklim dialogis tersebut. Kedekatan KHA Dahlan dengan tokoh-tokoh sosialis / komunis juga mencerminkan keluasan wawasan pemikiran beliau terhadap berbagai aspek peri-kehidupan masyarakat yang secara riil hidup di masyarakat. Keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah di daerah-daerah mayoritas Kristen seperti di NTT, yang menimbulkan istilah-istilah plesetan adanya "Pastor lulusan sekolah Muhammadiyah", atau Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) menjadi Universitas Muhammadiyah Kristen karena 75% mahasiswa UMK beragama Kristen, menjadi pelengkap dari konsistensi jati diri Muhammadiyah yang bercirikan Islam, tapi memiliki kepedulian besar terhadap kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, termasuk menghargai keragaman budaya dan kepercayaan masyarakat.

### II. MUHAMMADIYAH SEBAGAI *CIVIL SOCIETY MOVEMENT*.

3. Prof. James L. Peacock (*Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*, 1986, hal. 6) menulis bahwa:

*"sebagai gerakan yang memajukan Islam yang murni, Muhammadiyah telah memberikan sumbangan yang besar di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Pendek kata, Muhammadiyah merupakan suatu organisasi yang utama dan terkuat di negara terbesar kelima di dunia".*

Muhammadiyah banyak dikagumi dengan berbagai gerakan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial keagamaan. Memang Muhammadiyah adalah satu gerakan pembaharuan (*tajdid*) pemikiran Islam, dan hal tersebut diwujudkan langsung dalam berbagai gerakan amal usaha kemasyarakatan yang nyata. Bahkan satu syarat bagi diresmikannya satu cabang Muhammadiyah adalah, cabang tersebut harus telah memiliki kegiatan nyata.

4. *Statuten* Muhammadiyah pertama di tahun 1912, menekankan "menyegarkan dan memajukan" pengajaran agama Islam, sebagai cermin dari orientasi Muhammadiyah gerakan keagamaan dan kemasyarakatan. Semangat Al Ma'uun telah menjiwai Muhammadiyah sebagai gerakan reformasi. Hasilnya kini adalah, hampir 500 lembaga pelayanan kesehatan, hampir 200 lembaga pendidikan tinggi, 15 000 sekolah dari *bustanul athfal* (TK) hingga sekolah menengah umum, dan lebih dari 350 panti asuhan Muhammadiyah / Aisyiah.
5. Rumusan tujuan Muhammadiyah dalam mewujudkan *Islamic civil Islami*, baru muncul dalam rumusan AD Muhammadiyah tahun 1946 di pasal 2. Memang hampir tak mungkin mencantumkan rumusan *Islamic civil society* di statuta Muhammadiyah di jaman penjajahan Hindia Belanda. Apalagi pendekatan memajukan pendidikan agama Islam di masa penjajahan Hindia Belanda, sangatlah bernilai strategis dalam rangka membangun platform Muhammadiyah sebagai gerakan transformasi di masa depan. Rumusan tujuan versi 1946 tersebut muncul setelah semangat beramal usaha sudah semakin menguat menjadi "*mind set*" warga Muhammadiyah. Oleh karena itu yang terjadi kini adalah, bahwa Muhammadiyah lebih dikenal dan mengenal dirinya sebagai gerakan amal usaha, dan agak "gagap" dalam memposisikan diri sebagai gerakan *civil society*, walaupun Muhammadiyah sebagai gerakan, cukup memiliki semua elemen dan perilaku organisasi yang dituntut oleh satu gerakan *civil society*, namun dalam posisi *fragmented and not well coordinated*.
6. Dalam refleksi Muhammadiyah Jelang Satu Abad Muhammadiyah difahami, bahwa demikian banyak *empowerment measures* atau *centennial revitalizing* yang harus dilaksanakan oleh gerakan transformasi ini. Revitalisasi di bidang theologi, ideology, pemikiran, organisasi, kepemimpinan, amal usaha dan aksi (Haedar Nashir, 2006), semuanya diletakkan dalam konteks pemahaman kembali akan tujuan membangun *ummah*. Sementara Visi Muhammadiyah 2025 dengan jelas memperkuat komitmen dan pemahaman kembali ***terhadap tujuan, disertai memperkuat system gerakan atau "motoric" system***, karena kegagalan pewujudan *Islamic civil society*, seperti dikemukakan Ali Syari'ati (1989, 1-43) adalah (i) kurang memahami tujuan, (ii) kurang *encouragement* akan fungsi khilafat dan (iii) lemahnya system gerakan.

### III. MUHAMMADIYAH DAN KECENDERUNGAN GLOBAL

#### 7. Kecenderungan global.

Milenium ke tiga, ditandai dengan meluasnya beberapa kecenderungan global baru, yang meliputi: (i) Demokratisasi, HAM dan lingkungan, (ii) Perkembangan *civil society* sebagai basis dan pilar kedaulatan rakyat, (iii) Tumbuh pesatnya *community based groups* (CBO), yang justru menjadi fundamental *civil society* itu sendiri, dianggap sama fenomenal dengan terbentuknya negara bangsa lk 480 tahun sebelum Masehi

(iv) *Debirokratisasi, Reinventing the government, Banishing the Bureaucracy*, dan membangun *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, (v) *Otonomi daerah dan desentralisasi* dan (vi) Kesadaran akan *corporate social responsibility*, tanggung jawab sosial perusahaan (Sudibyo Markus, *Volunterism and Human Survival*, 2002: 52-54). Tak dapat disangkal, berbagai kecenderungan global tersebut, disamping tantangan, tapi juga merupakan "angin buritan" atau "*tail wind*" bagi Muhammadiyah.

8. Demokratisasi di Indonesia sudah selesai.

Segecap proses demokratisasi, pemberdayaan *civil society*, penguatan CBO, peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan, peningkatan *good governance* dan desentralisasi telah berjalan secara sepenggal-sepenggal, karena memang tak ada formula tunggal bagi sinkronisasi pelaksanaannya. Proses tersebut di Indonesia memang terlaksana agak mengejutkan dan tiba-tiba. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tahun 2005, secara tiba-tiba telah menempatkan Indonesia sebagai Negara demokratis dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, sementara selama ini dunia menganggap bahwa Islam tak relevan dengan demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Andrew MacIntyre dan Douglas Ramage dari Australian National University (ANU) melaporkan dalam buku "*Seeing Indonesia as Normal Country*" (<http://www.aspi.org.au/publication/>) yang diluncurkan tanggal 27 Mei 2008 yang lalu menegaskan, bahwa proses demokratisasi di Indonesia sudah selesai, dan Indonesia dianggap setaraf dengan negara demokrasi besar seperti Brazilia dan India.

Tapi penobatan sebagai Negara demokrasi secara tiba-tiba tersebut, tak serta merta diikuti oleh perilaku dan sikap demokratis di kalangan warga masyarakat. Sikap dan perilaku demokratis, yang menghargai perbedaan, siap untuk kalah atau menang, taat pada hukum dsb. Struktur, semangat dan jiwa *civil society* serta kesadaran berkewarganegaraan (*civic awareness*) belum serta merta bisa ditegakkan seiring dengan penobatan Indonesia sebagai negara demokrasi tersebut. Apalagi bila demokrasi tersebut baru dinikmati oleh segelintir elit politik, sementara pemenuhan hak-hak dasar masyarakat untuk dapat hidup secara layak masih jauh dari jangkauan sebagian besar warga masyarakat.

9. Hubungan demokratisasi, *good governance* dan *civil society*.

Hubungan antara demokratisasi, *good governance* dan pemberdayaan *civil society* memang tak selalu linier. Negara seperti Singapura yang baik di bidang *governance*, tapi kurang demokratis, dan peran dan fungsi *civil society* nya justru kalah dibanding Thailand, Malaysia dan Indonesia, walau Singapura memiliki infrastruktur *civil society* yang terstruktur rapi dari tingkat lingkungan, community club sampai ke tingkat Kotamadya dan nasional (Lee Hock Gan, *Civil Society in Southeast Asia*, 2004 :21).

Perlu dicatat, bahwa globalisasi tidak hanya bermakna globalisasi secara fisik dan geografis yang difasilitasi oleh kemajuan transportasi, komunikasi dan informasi – teknologi, tapi juga mengandung dua dimensi lain, yakni globalisasi ekonomi yang dikenal dengan *neo-liberalisme*, dan juga dimensi globalisasi politik berupa dominasi politik Negara adi-kuasa. Organisasi-organisasi internasional yang seharusnya netral seperti WHO, WTO, sudah sarat dengan kepentingan ekonomi global dan dominasi negara adikuasa. Tangan-tangan negara adi-kuasa, bisa saja menyeruak mempengaruhi keseluruhan proses demokrasi, governance, bahkan juga pemberdayaan *civil society* yang diperankan oleh CBO/NGO. .

#### IV. PEMBERDAYAAN CIVIL SOCIETY

##### 10. Pengertian.

Civil society bukan hanya pilar bagi kedaulatan rakyat, tapi juga merupakan basis dan fundamental bagi berbagai usaha perbaikan menuju masyarakat yang lebih baik dan maju. Upaya-upaya membangun demokratisasi, meningkatkan kesadaran akan HAM, meningkatkan sensitivitas dan perbaikan lingkungan, meningkatkan kesadaran akan pluralitas budaya, memerlukan struktur dan kematangan *civil society*.

Pengertian civil society "... adalah ruang publik antara individu, Negara dan pasar, dimana warga masyarakat dapat secara bebas berasosiasi mengembangkan berbagai kepentingan bersama".

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik *community-based groups / organization* (CBO) dan *non-government organization* (NGO), selama ini dianggap sebagai representasi dan pilar *civil society*, semata-mata karena keberadaannya yang berada paling dekat di lingkungan wilayah tempat tinggal warga masyarakat. Lembaga-lembaga lain seperti media, perguruan tinggi, kelompok pemikir (*think tank*), lembaga penelitian, lembaga adapt, adalah juga bagian dari civil society. Namun, tetap tak ada format tunggal dalam pemberdayaan civil society, semuanya tergantung pada tatanan masyarakat suatu bangsa tertentu.

##### 11. Mengapa perlu civil society?

Keberadaan civil society diperlukan untuk beberapa manfaat mendasar:

- i. Masyarakat dalam bidang dan skala tertentu, bisa memobilisasi diri dan keluar dari dominasi negara dan pasar, Masyarakat warga dapat membangun solidaritas kolektif, *cohesiveness* antar warga secara terstruktur,
- ii. Sebagai modal sosial atau *social capital*, sebagai pelengkap, atau bisa juga sebagai kompensasi dari keberadaan atau ketiadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia,
- iii. Sebagai penyeimbang proses demokratisasi dan *good governance*,
- iv. Selama ini *civil society* merupakan *terra incognita*, wilayah yang kurang dikenal,
- v. Perlunya segera memulai dan mengembangkan indikator untuk mengukur kadar anggota, tingkat partisipasi, kerelawanan, disposisi nilai-nilai, dsb di berbagai jenjang dan bidang gerak persyarikatan (mis. Di amal usaha pendidikan, kesehatan, ranting, dsb).
- vi. Sebagai kekuatan untuk melaksanakan advokasi kebijakan publik.

#### V. QUO VADIS LEMBAGA AMAL USAHA MUHAMMADIYAH...

12. Kita memang bangga akan percepatan pertumbuhan gerakan amal usaha Muhammadiyah, sehingga seorang James L. Peacock menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan kemanusiaan terbesar didunia diluar gerakan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Gereja. Tapi kepesatan perkembangan dan besarnya kuantitas lembaga amal usaha Muhammadiyah diikuti oleh dua kelemahan melekat berupa,

- i kelemahan manajerial seperti kurang profesional, umumnya berkembang secara "natural" karena naluri beramal, penerapan manajemen mutu masih rendah, kelemahan sinergi antara pemiliki, manajemen dan profesional lemah, serta kelemahan networking antara sesama amal usaha.
- ii terjebak dalam kemapanan lembaga amal usaha, namun mengalami disorientasi sebagai gerakan pembaharuan dan gerakan masyarakat warga

atau *civil society*, yang justru **meletakkan komunitas basis sebagai basis kegiatan dan kekuatannya**.

Tak kurang dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin yang dalam pidato iftitahnya dalam pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta, 2007 mengingatkan kita, akan jebakan lembaga amal usaha tersebut, sementara kita terjauhkan dari semangat *al fikrah* dan *jama'iah* yang telah menjiwai pertumbuhan Muhammadiyah selama ini.

13. Dari gerakan *Islamic civil society* terjebak menjadi gerakan amal usaha.

Sebagaimana rumusan tujuan persyarikatan “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, hingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar0-benarnya”, Muhammadiyah pada dasarnya, dan pada awalnya adalah gerakan ***Islamic civil society***. Perkembangan yang pesat dari amal usaha Muhammadiyah dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, merupakan hal yang menggembirakan, tapi juga sekaligus juga memprihatinkan. Gerakan Muhammadiyah mengalami **reduksi** dan penyakit rabun dekat. Orientasi terhadap masyarakatan basis yang seharusnya menjadi fokus perhatian dari gerakan persyarikatan, menjadi semakin kabur, karena Muhammadiyah terjebak sebagai gerakan amal usaha, dan menjadi lahan bagi para **“pengrajin”** amal usaha untuk berebut mencari nafkah. Menjadi “Pengrajin” bukanlah sesuatu yang “haram” atau buruk, tapi hal tersebut tidaklah cukup. Yang diperlukan dari Muhammadiyah sekarang adalah:

- i. Kembali berorientasi kepada gerakan masyarakat basis yang bertumpu di ranting dan jama'ah-jama'ah, dengan motor program *qoryah thoyyibah* dan *gerakan da'wah dan da'wah jama'ah (GJDJ)*, dan
- ii. Mengadakan transformasi dan konsolidasikan seluruh amal usaha sektoralnya untuk mendukung visi abadi, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, atau pewujudan civil Islami, *Islamic civil society* (***Visi Muhammadiyah 2025***).

Kaliurang, 22 Dzulhijjah 1429 H /13 Desember 2008

Sudibyo Markus  
Ketua PP Muhammadiyah